


# PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

## LAPORAN KEUANGAN

Semester I

Periode 2021

Kode Satker 401909



Jl. HM. Asyik Aqil KM. 16 Sukajadi Talang Kelapa

Banyuasin - Sumatera Selatan

---



**LAPORAN KEUANGAN**  
**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN**  
**BALAI**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2021**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. HM. Asyik Aqil KM. 16 Sukajadi Talang Kelapa**

**Banyuasin - Sumatera Selatan**

**Telp/Fax. (0711) 5723669**

**e-mail : pn-pangkalanbalai@gmail.com**

---

# *KATA PENGANTAR*

---

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalan Balai, 01 Juli 2021  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,

  
**ENDANG EFENDI, S.E., M.M.**  
NIP.198409132009041002

# DAFTAR ISI

---

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran.....	1
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	14
II. Neraca.....	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	23
A. Penjelasan Umum.....	23
A.1. Dasar Hukum.....	23
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.....	24
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	25
A.4. Basis Akuntansi.....	25
A.5. Dasar Pengukuran.....	26
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	26
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	33
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	33
B.2. Belanja.....	33
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	35
C.1. Aset Lancar.....	35
C.2. Aset Tetap.....	36
C.5. Kewajiban Jangka Pendek.....	37
C.6. Ekuitas.....	38
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	38
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	38
D.2. Beban Pegawai.....	38
D.3. Beban Persediaan.....	38

D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	39
D.5.	Beban Pemeliharaan.....	39
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	39
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	39
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	39
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	39
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih.....	40
D.11.	Beban Lain-lain.....	40
D.12.	Kegiatan Non Operasional.....	40
D.13.	Pos Luar Biasa.....	40
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	40
E.1.	Ekuitas Awal.....	40
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	41
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset.....	41
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan.....	41
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	41
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi.....	41
E.3. 5	Koreksi Lain-lain.....	42
E.3.	Ekuitas Akhir.....	42
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	42
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	42
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	42

## DAFTAR TABEL

---



## Daftar Tabel dan Lampiran

---

Tabel 1 Ringkasan Neraca per30 Juni TA 2020 dan 31 Desember 2020	11
Tabel 2 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA.2021	33
Tabel 3 Perbandingan realisasi PNBPN per 30 Juni 2021 dan 2020	33
Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per30 Juni TA 2021	34
Tabel 5 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021	34

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

---

## **Pengadilan Negeri Pangkalan Balai**

**Jalan HS. Ayik Aqil Km.16, Sukajadi - Banyuasin, Sumatera Selatan**

**Telp/fax : (0711)-5723669**

**e-mail : pn-pangkalanbalai@gmail.com**

---

### **Pernyataan Tanggung Jawab**

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2021 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan Balai, 01 Juli 2021  
**Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,**

**ENDANG EFENDI, S.E., M.M.**  
**NIP.198409132009041002**

# *RINGKASAN*

---

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, yang terdapat dalam periode tersebut. Untuk Belanja, dimana Jumlah Belanja dengan anggaran Rp24.513.366.000,-(dua puluh empat milyar lima ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) terealisasi untuk semester I sebesar Rp. 16.798.729.533,-(enam belas milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah)

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juli 2021

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset Semester I Tahun 2021 per 30 Juni 2021 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 35.100.000,-(tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) kewajiban sebesar Rp.35.100.000,-(tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan Ekuitas sebesar Rp.23.097.521.517,-(dua puluh tiga milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh belas rupiah)

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2020 dan 31 Desember 2020  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2020	31 Desember 2019	Rp	%
<b>Aset Lancar</b>				
Kas di bendahara pengeluaran	35.000.000	0	35.000.000	0.00
Persediaan	0	15.238.000	(15.238.000)	(100,00)
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>35.000.000</b>	<b>15.238.000</b>	<b>19.862.000</b>	<b>130.34</b>
<b>Kewajiban</b>				
Utang Pada Pihak Ketiga	0	22.350.904	(22.350.904)	(100,00)
Uang Muka KPPN	35.100.000	0	35.100.000	0.00
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>35.100.000</b>	<b>22.350.904</b>	<b>12.759.096</b>	<b>57.04</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>23.097.521.517</b>	<b>8.868.690.094</b>	<b>14.228.831.423</b>	<b>160.43</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>23.097.521.517</b>	<b>8.891.040.998</b>	<b>14.241.580.519</b>	<b>160.17</b>
Dana				

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pada laporan Semester I Tahun 2021 untuk periode 2021, pendapatan Operasional sebesar Rp0, Beban Operasional Rp.2.569.898.110,-(dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah) Surplus / (Defisit)-LO sebesar Rp. (2.569.898.110),-(minus dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah)

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas yang berakhir pada periode 30 Juni 2021 dimana Ekuitas Awal sebesar Rp.8.868.690.094,-(delapan milyar delapan ratus enam puluh

delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh empat rupiah) Surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp.(2.569.898.110),-(minus dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah) dan Ekuitas akhir sebesar Rp23.097.521.517,-(dua puluh tiga milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh belas rupiah)

## 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode tahun 2020, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

# *I. LRA PERBANDINGAN*

---



# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2021**  
*( dalam satuan Rupiah )*

Uraian	Catatan	TA.2021		
		Anggaran	Realisasi	%
<b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>			
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	0	0,00
<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>			
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	3.669.971.000	1.1995.227.284	53.93
2. Belanja Barang	B.2.2.	993.770.000	467.159.776	47.01
3. Belanja Modal	B.2.3.	19.819.625.000	14.336.342.473	72.33
<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>24.513.366.000</b>	<b>16.798.729.533</b>	<b>68.53</b>

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

---

## II. Neraca

**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**  
**NERACA**  
**PER 30 JUNI 2021**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 JUNI 2020
<b>ASET</b>		
Aset Lancar	C.1	
Kas dan Bank		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	35.100.000
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0
Persediaan	C.1. 3.	0
Jumlah Aset Lancar		35.100.000
Aset Tetap	C.2	
Tanah	C.2. 1.	2.819.580.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	983.157.620
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	310.781.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	19.567.019.588
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(583.016.691)
Jumlah Aset Tetap		23.097.521.517
Jumlah Aset		23.097.521.517
<b>KEWAJIBAN</b>		
Kewajiban Jangka Pendek	C.5	
Utang kepada pihak ketiga	C.5 1.	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	35.100.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		35.100.000
Jumlah Kewajiban		35.100.000

**EKUITAS**

Ekuitas	C.6	23.097.521.517
Jumlah Ekuitas Dana		23.097.521.517
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		23.097.521.517

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

---

### III. Laporan Operasional

**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 30 JUNI 2021 DAN 2020**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2021	30 Juni 2020
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	1.976.559.284	1.579.955.897
Beban Persediaan	D. 3	27.332.000	7.968.500
Beban Barang dan Jasa	D. 4	410.693.687	357.356.295
Beban Pemeliharaan	D. 5	25.577.685	127.087.525
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	15.111.500	23.604.464
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	114.623.954	115.785.778
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>2.569.898.110</b>	<b>2.211.758.459</b>
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(2.569.898.110)	(2.211.758.459)
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
	D. 12		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	385.000
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>0</b>	<b>385.000</b>

## Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	D. 13		
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) LO		(2.569.898.110)	(2.211.373.459))

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 30 JUNI 2021 DAN 2020**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	8,868,690,094	2,103,799,581	6,764,890,513	321.55
SURPLUS/DEFISIT - LO	( 2,569,898,110)	( 2,211,373,459)	( 358,524,651)	16.21
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KE SALAHAN MENDASAR	0	0	0	0.00
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	0.00
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	16,798,729,533	3,045,745,832	13,752,983,701	451.54
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	14,228,831,423	834,372,373	13,394,459,050	1,605.33
EKUITAS AKHIR	23,097,521,517	2,938,171,954	20,159,349,563	686.11



V. *CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN*

---

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan, melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Tahun 2021 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Untuk mewujudkan tujuan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berkomitmen dengan visi :

- 1. *Menjaga Kemandirian*

2. *Pelayanan Hukum yang berkeadilan*
3. *Meningkatkan Kredibilitas Profesional dan Transparansi*
4. *Pelayanan yang Efektif, Efisien dan Transparansi*

Untuk mewujudkan visi tersebut akan dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Memberikan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Secara Efektif dan Efisien.
- Memberikan pelayanan hukum yang mempunyai kepastian dan berkeadilan.
- Menciptakan kredibilitas profesional dan transparansi.

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akruaI dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut:

#### (1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### (2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### (4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan	100%

## pelunasan

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia  
Urusan Piutang Negara/DJKN

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.



- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusunan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6.) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
  - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
  - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

#### (7.) **Ekuitas**

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi  
Pendapatan  
Negara  
dan  
Hibah :  
Rp  
0

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 2 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2021  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3 Perbandingan Realisasi PNBP per30 Juni TA 2021 dan 2020  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	2020	Perubahan	
				Rp	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### B.2. Belanja

Realisasi  
Belanja  
Negara :  
Rp  
16.798.729.  
533

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp. 16.798.729.533,-(enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) anggaran senilai Rp. Rp24.513.366.000,-(dua puluh empat milyar lima ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah). Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2021 dapat

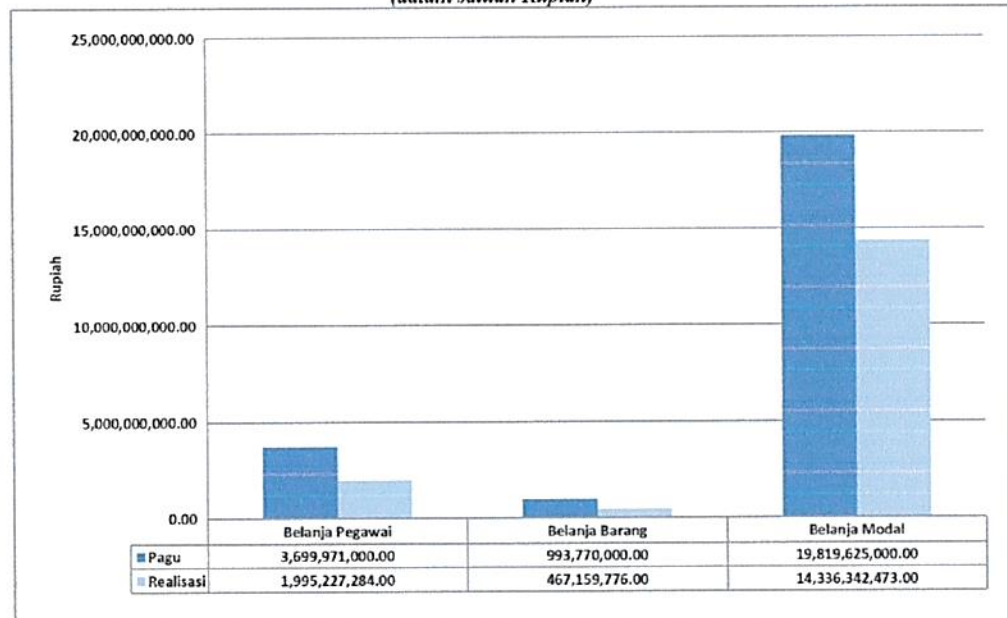
dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September TA 2019		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.699.971.000	1.995.227.284	53.93
Belanja Barang	993.770.000	467.159.776	47.01
Belanja Modal	19.819.625.000	14.336.342.473	72.33
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>24.513.366.000</b>	<b>16.798.729.533</b>	<b>68.53</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021**  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) Juni 2020

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp. Rp.16.798.729.533,-(enam belas milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), atau sebesar 68.53% dari anggaran senilai Rp. Rp24.513.366.000,-(dua puluh empat milyar lima ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

### **B.2.1. Belanja Pegawai**

*Realisasi  
Belanja  
Pegawai :  
Rp  
3.699.971.0  
00,-*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 Juni TA 2021 Rp.1.995.227.284,-(satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) dari anggaran sebesar Rp. 3.699.971.000,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari anggaran awal sebesar

### **B.2.2. Belanja Barang**

*Realisasi  
Belanja  
Barang :  
Rp993.770.  
000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 Juni TA 2021 sebesar Rp.467.159.776,-(empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah)dari anggaran Rp.993.770.000,-(sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari anggaran sebesar

### **B.2.3. Belanja Modal**

*Realisasi  
Belanja  
Modal :Rp  
14.336.342.  
473*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 Juni 2021 dan TA 2021 adalah Rp.14.336.342.473,-(empat belas milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari anggaran Rp.19.819.625.000,-(sembilan belas milyar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

## **C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca**

*Aset Lancar:  
Rp 35.100.000*

### **C.1. Aset Lancar**

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2021 sebesar Rp. 35.100.000,-(tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah)

#### **C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran:  
Rp 35.100.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021 sebesar Rp.35.100.000,-(tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

### C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

---

*Belanja Dibayar di Muka: Rp 0* Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2021 sebesar Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

### C.1.3. Persediaan

---

*Persediaan: Rp 0* Persediaan periode 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

## C.2. Aset Tetap

---

*Aset Tetap : Rp 23.132.621.517* Nilai Aset Tetap periode 30 Juni 2021 tersaji sebesar Rp 23.132.621.517-(dua puluh tiga milyar seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh belas rupiah). Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

### C.2.1. Tanah

---

*Tanah: Rp2.819.580.000* Nilai Aset Tetap berupa Tanah periode 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 2.819.580.000,-(dua milyar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

---

*Peralatan dan Mesin : Rp 983.157.620* Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin periode 30 Juni 2021 sebesar Rp983.157.620,-(sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah)

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

---

*Gedung dan Bangunan : Rp 310.781.000* Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan periode 30 Juni 2021 sebesar

Rp.310.781.000,- (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

#### **C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan**

*Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp 0* Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

#### **C.2.5. Aset Tetap Lainnya**

*Aset Tetap Lainnya: Rp 0* Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya periode 30 Juni 2021 sebesar Rp.0

#### **C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan**

*Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp 19.567.019.588* Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan periode 30 Juni 2021 sebesar Rp.19.567.019.588,- (sembilan belas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah)

#### **C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

*Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp.(583.016.691)* Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 30 Juni 2020 sebesar Rp(583.016.691),-(lima ratus delapan puluh tiga juta enam belas ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)

### **C.5. Kewajiban Jangka Pendek**

*Kewajiban Jangka Pendek : Rp35.100.000* Nilai Kewajiban Jangka Pendek periode 30 Juni 2021 sebesar Rp.35.100.000,-(tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah)

#### **C.5.1. Uang Muka dari KPPN**

*Uang Muka dari KPPN: Rp 35.100.000* Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2021 sebesar Rp.35.100.000,-(tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah). Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.



Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

## C.6. Ekuitas

*Ekuitas:  
Rp  
23.097.521.517,-* Ekuitas periode 30 Juni 2020 sebesar sebesar Rp23.097.521.517,-(dua puluh tiga milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh belas rupiah) Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan  
PNbp : Rp0* Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp Rp 0.

### D.2. Beban Pegawai

*Beban  
Pegawai : Rp  
1.976.559.284* Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 sebesar Rp 0 dan Rp 1.976.559.284,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah). Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

### D.3. Beban Persediaan

*Beban  
Persediaan : Rp  
27.332.000* Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 27.332.000,-(dua puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Rp 7.968.500.(tujuh milyar sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

#### **D.4. Beban Barang dan Jasa**

*Beban Jasa : Rp  
410.693.687*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 Rp 410.693.687,- (empat ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

#### **D.5. Beban Pemeliharaan**

*Beban  
Pemeliharaan:  
Rp 25.577.685*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 sebesar Rp 25.577.658,-(dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

#### **D.6. Beban Perjalanan Dinas**

*Beban  
Perjalanan  
Dinas :  
Rp15.111.500*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.15.111.500,-(lima belas juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah) Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

#### **D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat :  
Rp 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

#### **D.8. Beban Bantuan Sosial**

*Beban Bantuan  
Sosial : Rp 0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

#### **D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

*Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi : Rp*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni

114.623.954 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 114.623.954-(seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

#### **D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih**

*Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp 0* Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

#### **D.11. Beban Lain-lain**

*Beban Lain-Lain : Rp 0* Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 sebesar Rp 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

#### **D.12. Kegiatan Non Operasional**

*Beban Kegiatan Non Operasional : Rp 0* Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Beban kegiatan non oprasional untuk periode 30 Juni 2021 adalah Rp 0,-

#### **D.13. Pos Luar Biasa**

*Beban Pos Luar Biasa : Rp 0* Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk periode 30 Juni 2021 adalah Rp. 0,-

### **E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas**

#### **E.1.Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas awal pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 8.868.690.094,-(delapan milyar

delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh empat rupiah)

## **E.2.Surplus (defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp (2.569.898.110),-(minus dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sepuluh ribu rupiah) dan Rp(2.211.373.459),-(minus dua milyar dua ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### **E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

### **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 Dan Rp 0.

### **E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

### **E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

### **E.3.5 Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp (0). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

### **E.3.6 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 23.097.521.517,-(dua puluh tiga milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dan Rp. 2.938.171.954,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah)

## **F. Pengungkapan Penting Lainnya**

### **F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca**

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

### **F.2. Pengungkapan Lain-lain**

#### **F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK**

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan ini.

#### **F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual**

Tidak ada informasi pendapatan dan belanja secara akrual dalam laporan keuangan ini.

#### **F.2.3. Rekening Pemerintah**

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah:

1. BRI Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000497305 a.n. BPG 160 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA

2. BRI Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000496309 a.n. BPG 160 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 03 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM
3. Bank BRI (Persero) Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000489302 a.n. RPL 160 PN P Balai Utk Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3

#### **F.2.4. Revisi DIPA**

---

1. Revisi I tertanggal 10 Februari 2021;
2. Revisi II tertanggal 23 Februari 2020;
3. Revisi III tertanggal 02 maret 2021;
4. Revisi IV tertanggal 07 April 2021;
5. Revisi V tertanggal 30 April 2021;
6. Revisi VI tertanggal 04 Juni 2021;

#### **F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

---

Tidak ada informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB yang dapat dijabarkan dalam laporan keuangan ini.

#### **F.2.6. Catatan Penting Lainnya**

---

-Nihil-

# LAPORAN PENDUKUNG

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN  
TINGKAT SATKER  
PERIODE TA. 2020 *UNAUDITED***

Kode BA dan Nama BA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG RI  
Kode Es1 dan Nama Es1: (01 ) Badan Urusan Administrasi  
Kode Wilayah dan Nama Wilayah: (1109 ) Banyuasin  
Kode Satker dan Nama Satker: (401909 ) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang ( ✓ ) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
<b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN</b>			
<b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (<i>Hardcopy</i>)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Pernyataan Tanggung Jawab			Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>			Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan			Ada
<b>Laporan Keuangan Tambahan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Neraca Percobaan AkruaI			Ada
2. Neraca Percobaan Kas			Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja			Ada
<b>KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&amp;LK</b>			
	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2019?			Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&amp;LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
<b>KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI</b>			
<b>Neraca <i>Balance</i></b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah Satker Neracanya tidak <i>balance</i> ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak <i>Balance</i> "			Tidak
<b>Saldo antar Laporan</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE			Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca			Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>			
<b>NERACA PERCOBAAN AKRUAL</b>			
<b>PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu <i>Daftar &gt;&gt; Akun Non Ref</i> )			Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu " <i>Daftar &gt;&gt; Saldo Tidak Normal</i> "), kecuali akun " <i>Beban Penyisihan Piutang</i> " dan " <i>Kas dan Bank BLU Belum Disahkan</i> "			Tidak
<b>TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN</b>			
<b>AKUN ASET (1xxxxx)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BUKU Layanan Kesehatan di Kemristek Dikti			Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? ( <i>Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN</i> )			Tidak
<b>Akun Dibayar dimuka (<i>prepaid</i>) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (<i>Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN</i>)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi <b>dibayar dimuka (<i>prepaid</i>)</b>			Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 <b>Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain</b>			Tidak



AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			Tidak
<b>Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? ( <i>Cek di Neraca Percobaan saldo awal</i> )			Ya/Tidak
2. Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2020? ( <i>untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2020</i> )			Ya
3. Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Tidak
<i>Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i>			
4. Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211 ?			Ya
<b>AKUN EKUITAS (3xxxxx)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan			Tidak
2. Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI			Tidak
3. Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap			Ya
4. Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya			Ada/Tidak
5. Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya?			Ya
6. Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah			Ya
<i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari laporan keuangan tahunan di Akuntansi Perkotaan</i>			
<b>Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)</b>			
1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK			0
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&amp;LK (menu monitoring &gt;&gt; Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>			
2. Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan			0
<b>AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)</b>			
<b>Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?			Tidak
<b>Ketepatan penggunaan Akun PNBPN Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah akun 423xxx			Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621			Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx			Tidak
4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998			Tidak

Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/lain-lain/transfer TAYL			Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan			Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)			Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah			Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?			Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)			Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?			Tidak
TELAAH TERKAIT BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"			Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? (cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU			Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)			Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			-
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>				
5	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)			Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>				
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya

LAPORAN OPERASIONAL				
<b>Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)			Tidak
2.	Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3.	Adakah beban bunga			Tidak
4.	Adakah beban subsidi			Tidak
5.	Adakah beban hibah			Tidak
6.	Adakah beban transfer			Tidak
7.	Adakah beban lain-lain			Tidak
<b>Pengecekan saldo Normal</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
8.	Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya ( <i>saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi</i> )			Tidak
9.	Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang			Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>				
<b>Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
10.	Saldo Awal Penyisihan Piutang ( <i>Jk.Pendek dan Jk.Panjang</i> ) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang ( <i>Jk.Pendek dan Jk.Panjang</i> ) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>				
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"			Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.</i>				
2.	Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>				
<b>Pengecekan akun koreksi</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119				
1.	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya
<b>Contoh 1 :</b> Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.				
<b>Contoh 2 :</b> Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan.				
NERACA				
		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Ya
2.	Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?			Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>				
3.	Dari kolom perbandingan antara 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019 adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?			Tidak
4.	Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2019, Apakah demikian?			Ya

**TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN**

*Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"*

<b>Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?			Ya
<b>Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
<b>Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
<b>Pengecekan persediaan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
<b>Pengecekan penyusutan aset tetap</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&amp;LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
<b>Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat &amp; Beban Bansos</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
<b>Pengecekan Jurnal Akrua</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?			Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?			Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas ( ) ?			Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca			Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca			Ada
<b>KESESUAIAN DENGAN L-BMN</b>			
<b>Rekon Internal LKKL dengan L-BMN</b>	<b>Ya/Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?			Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2020 di e-Rekon&LK?			Tidak
<i>Pada e-Rekon&amp;LK G2 lihat menu "Monitoring BMN&gt;&gt; Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
3. Apakah menurut e-Rekon-ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK?			Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")			
<b>MENU DAFTAR BMN</b>			
	Seharusnya	Ya	Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			
<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b>			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")			Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?			Tidak
<b>Pengecekan TDK</b>			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?			Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS			Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
<i>e-Rekon&amp;LK Menu Monitoring &gt;&gt; Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>			
<b>SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA</b>			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
<b>Satker Konsolidasian</b>	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2019 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?			
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?			
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2020</i>			
<b>Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)</b>	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?			Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?			Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan			Tidak
4. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)			Ya
5. Adakan PNBPN digunakan langsung?			Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?			Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?			Ya
8. ....			Ya

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)			Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?			Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?			Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?			Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?			Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?			Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?			Ya
9. Apakah belanja dalam rangkan penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?			Ya
<b>ANALISIS LAINNYA</b>			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional			Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)- Hibah Langsung Barang			Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2020 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2020			Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir ( <i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i> )			Ya
<b>Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19</b>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19			
2. Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp		
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19			
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	Ada	Tidak	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas	Ada	Tidak	
10. Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.			

11. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		
<b>Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
12. Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		
a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		
b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		
c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		
d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan .....		
13. Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		
a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		
b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		

*Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.*

**LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN**

*"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"*

Mengetahui  
Pejabat Penyusun LKKL,

MUHAMMAD IMAN SEPTIAN S.Ip  
NIP.19850921 201101 1 011

.....  
Penelaah,  
  
ENDANG EFENDI S.E., M.M  
NIP. 19840913 200904 1 002

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL, EKSTRAKOMPTABEL DAN AMORTISASI  
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
PER TANGGAL 30 JUNI 2021  
TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA UAKPB : 005.01.11.401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 01

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 30 JUNI 2021									
KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
132111	PERALATAN DAN MESIN		173	1.011.399,270	383.558,327	103.995,988	0	487.554,315	523.844,955		
3.02.01.02.003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Unit	1	239,368,000	68,390,856	17,097,714	0	85,488,570	153,879,430		
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	2	58,950,000	15,357,142	4,210,714	0	19,567,856	39,382,144		
3.03.02.05.014	Crimping Tolls	Buah	1	541,650	162,495	54,165	0	216,660	324,990		
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Buah	7	28,385,000	14,192,500	2,838,500	0	17,031,000	11,354,000		
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Buah	7	23,415,000	11,707,500	2,341,500	0	14,049,000	9,366,000		
3.05.01.04.007	Brandkas	Buah	1	5,400,000	2,700,000	540,000	0	3,240,000	2,160,000		
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	Buah	1	5,500,000	2,750,000	550,000	0	3,300,000	2,200,000		
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	33	50,020,000	25,520,000	4,900,000	0	30,420,000	19,600,000		
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	20	8,100,000	7,357,500	247,500	0	7,605,000	495,000		
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	Buah	8	600,000	600,000	0	0	600,000	0		
3.05.02.01.007	Bangku Panjang Kayu	Buah	12	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0		
3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	28	30,800,000	15,400,000	3,080,000	0	18,480,000	12,320,000		
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	6	30,000,000	15,000,000	3,000,000	0	18,000,000	12,000,000		
3.05.02.06.030	Tiang Bendera	Buah	2	150,000	150,000	0	0	150,000	0		
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	4	10,136,000	3,040,800	1,013,600	0	4,054,400	6,081,600		
3.06.01.02.135	LCD Monitor	Buah	1	1,100,000	550,000	110,000	0	660,000	440,000		
3.08.01.41.251	Stabilizer/UPS	Buah	1	7,670,500	1,438,218	479,406	0	1,917,624	5,752,876		
3.10.01.01.002	Mini Komputer	Buah	10	123,400,000	24,600,000	15,425,000	0	40,025,000	83,375,000		
3.10.01.01.999	Komputer Jaringan Lainnya		2	53,375,600	20,015,850	6,671,950	0	26,687,800	26,687,800		
3.10.01.02.001	P/C Unit	Buah	8	87,917,600	42,761,100	10,989,700	0	53,750,800	34,166,800		
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	5	61,198,080	28,948,800	7,649,760	0	36,598,560	24,599,520		
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	8,000,000	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000	2,000,000		



LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL, EKSTRAKOMPTABEL DAN AMORTISASI  
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
PER TANGGAL 30 JUNI 2021  
TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA UAKPB : 005.01.11.401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 01

KODE	URAIAN	SAT	KUANITAS	NILAI	SALDO PER 30 JUNI 2021					NILAI BUKU
					AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.10.02.04.001	Server	Buah	2	122.414,500	55,431,563	15,301,812	0	70,733,375	51,681,125	
3.10.02.04.002	Router	Buah	3	26,629,000	9,985,875	3,328,625	0	13,314,500	13,314,500	
3.10.02.04.003	Hub	Buah	1	8,970,000	3,363,750	1,121,250	0	4,485,000	4,485,000	
3.10.02.04.014	Rak Server	Buah	2	14,984,090	5,619,035	1,873,011	0	7,492,046	7,492,046	
3.10.02.04.030	Network Cable Tester	Buah	1	1,374,250	515,343	171,781	0	687,124	687,126	
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		1	310,781,000	100,346,905	13,152,131	0	113,499,036	197,281,964	
4.01.01.24.001	Bangunan Tempat Sidang/Zitring Plaat	Unit	1	310,781,000	100,346,905	13,152,131	0	113,499,036	197,281,964	
	<b>TOTAL</b>			1,322,180,270	483,905,232	117,148,119	0	601,053,351	721,126,919	

PANGKALAN BALAI, 27 Januari 2021

Penanggung Jawab UAKPB  
KUASA PENGGUNA BARANG

  
ENDANG EFENDI, S.E., M.M.  
198409132109041012

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
 TINGKAT SATUAN KERJA**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2021 DAN 2020  
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN  
 SATUAN KERJA : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
 JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	8,868,690,094	2,103,799,581	6,764,890,513	321.55
SURPLUS/DEFISIT - LO	( 2,569,898,110)	( 2,211,373,459)	( 358,524,651)	16.21
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0	0	0	0.00
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	0.00
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	16,798,729,533	3,045,745,832	13,752,983,701	451.54
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	14,228,831,423	834,372,373	13,394,459,050	1,605.33
EKUITAS AKHIR	23,097,521,517	2,938,171,954	20,159,349,563	686.11

Pangkalan Balai, 01 Juli 2021  
 Sekretaris



Endang Efendi S.E., M.M.  
 NIP. 198409132009041002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
WILAYAH/PROVINSI : 1100 SUMATERA SELATAN  
SATUAN KERJA : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap : LPAST  
Tanggal : Wednesday, August  
Halaman : 1  
Page Id : 101 quarter

No	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>								
A.1.1	PENERIMAAN NEGARA	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.1.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.1.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.1.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
<b>B</b>	<b>BELANJA NEGARA</b>								
B.1.1	Rupiah Murni	24,513,366,000	16,798,729,533	( 7,714,636,467)	68.53	8,881,139,000	3,045,745,832	( 5,835,393,169)	34.29
B.1.1.a	Belanja Pegawai	3,699,971,000	1,995,227,284	( 1,704,743,716)	53.93	2,604,233,000	1,579,955,897	( 1,024,277,103)	60.67
B.1.1.b	Belanja Barang	993,770,000	467,159,776	( 526,610,224)	47.01	866,402,000	530,722,320	( 335,679,680)	61.26
B.1.1.c	Belanja Modal	19,819,625,000	14,336,342,473	( 5,483,282,527)	72.33	5,410,504,000	935,067,615	( 4,475,436,385)	17.28
B.1.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	24,513,366,000	16,798,729,533	( 7,714,636,467)	68.53	8,881,139,000	3,045,745,832	( 5,835,393,169)	34.29
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>								
C.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
WILAYAH/PROVINSI : 1100 SUMATERA SELATAN  
SATUAN KERJA : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lapp. : LRAST  
Tanggal : Wednesday, August  
Halaman : 2  
Prog. Id : lu\_pntrk

No	URAIAN	2021					2020				
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

Pangkalan Balai, 01 Juli 2021  
Sekretaris

Endang Efendi S.E.,M.M  
NIP. 198409132009041002

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**  
**(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NSAIE1T  
 Tanggal : 25/08/21  
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN  
 SATUAN KERJA : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
 JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	35,100,000	0	35,100,000	0.00
Persediaan	0	15,238,000	( 15,238,000)	( 100.00)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>35,100,000</b>	<b>15,238,000</b>	<b>19,862,000</b>	<b>130.34</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	2,819,580,000	2,819,580,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	983,157,620	958,157,620	25,000,000	2.60
Gedung dan Bangunan	310,781,000	310,781,000	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	19,567,019,588	5,255,677,115	14,311,342,473	272.30
Akumulasi Penyusutan	( 583,016,691)	( 468,392,737)	( 114,623,954)	24.47
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>23,097,521,517</b>	<b>8,875,802,998</b>	<b>14,221,718,519</b>	<b>160.23</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>23,132,621,517</b>	<b>8,891,040,998</b>	<b>14,241,580,519</b>	<b>160.17</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	22,350,904	( 22,350,904)	( 100.00)
Uang Muka dari KPPN	35,100,000	0	35,100,000	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>35,100,000</b>	<b>22,350,904</b>	<b>12,749,096</b>	<b>57.04</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>35,100,000</b>	<b>22,350,904</b>	<b>12,749,096</b>	<b>57.04</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	23,097,521,517	8,868,690,094	14,228,831,423	160.43
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>23,097,521,517</b>	<b>8,868,690,094</b>	<b>14,228,831,423</b>	<b>160.43</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>23,132,621,517</b>	<b>8,891,040,998</b>	<b>14,241,580,519</b>	<b>160.17</b>

Pangkalan Balai, 01 Juli 2021  
 Sekretaris

Endang Efendi S.E.,M.M  
 NIP. 198409132009041002

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 30 JUNI 2021**  
**(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: LSAIKB  
 Tanggal : 25/08/21  
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN  
 SATUAN KERJA : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
<b>ASET</b>	
<b>ASET LANCAR</b>	
Kas di Bendahara Pengeluaran	35,100,000
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>35,100,000</b>
<b>ASET TETAP</b>	
Tanah	2,819,580,000
Peralatan dan Mesin	983,157,620
Gedung dan Bangunan	310,781,000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	19,567,019,588
Akumulasi Penyusutan	( 583,016,691)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>23,097,521,517</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>23,132,621,517</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	
Uang Muka dari KPPN	35,100,000
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>35,100,000</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>35,100,000</b>
<b>EKUITAS</b>	
<b>EKUITAS</b>	
Ekuitas	23,097,521,517
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>23,097,521,517</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>23,132,621,517</b>

Pangkalan Balai, 01 Juli 2021  
 Sekretaris



Endang Efendi S.E., M.M  
 NIP. 198409132009041002

**LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA  
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN  
SEMESTER I TAHUN 2021  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN  
 SATUAN KERJA : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBS01  
 Tanggal : 25-08-21  
 Halaman : 1  
 Prog.id : lu\_rapbstks

KODE	URAIAN	3	4	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			8	9
				ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	JUMLAH S/D SEMESTER YANG LALU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	TRANSAKSI KAS							
0	RUPIAH MURNI							
03	RM							
04	KERTIBAN DAN KEAMANAN							
WA	PERADILAN							
1066	Program Dukungan Manajemen							
EAA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi							
51	Layanan Perkantoran							
5111	PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI							
511119	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0	0	29	0.00	0
	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	0	0	0	29	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111	0	0	0	0	29	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51	0	0	0	0	29	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 1066.EAA	0	0	0	0	29	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 1066	0	0	0	0	29	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 03.04.WA	0	0	0	0	29	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 03.04	0	0	0	0	29	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 03	0	0	0	0	29	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN 0	0	0	0	0	29	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01	0	0	0	0	29	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER KD	0	0	0	0	29	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS	0	0	0	0	29	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0	29	0.00	0

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0	115612	Piutang dari KPPN	7,714,636,467	1,454,678,000
2	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS		26,000
2	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS		100,174,000
2	511121	Allotment Belanja Tunj. Suam/istri PNS		28,683,000
2	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS		28,944,000
2	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS		1,259,218,000
2	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS		182,814,000
2	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS		93,812,000
2	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS		421,977,000
2	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS		129,645,000
2	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS		435,320,000
2	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran		11,630,000
2	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		42,340,000
2	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		33,750,000
2	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya		12,700,000
2	521241	Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		27,000,000
2	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		60,000,000
2	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik		9,000,000
2	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon		6,000,000
2	522113	Allotment Belanja Langganan Air		136,080,000
2	522141	Allotment Belanja Sewa		119,250,000
2	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		52,400,000
2	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		48,300,000
2	524111	Allotment Belanja Peralatan Biasa		1,331,160,000
2	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin		18,488,465,000
3	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	814,432,500	
3	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15,703	
3	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS		29
3	511121	Belanja Tunj. Suam/istri PNS	64,246,166	
3	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	17,277,933	
3	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	16,080,000	
3	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	800,980,000	
3	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	87,497,031	
3	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	52,069,980	
3	511129	Belanja Uang Makan PNS	130,053,000	
3	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	12,575,000	
3	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	270,548,000	
3	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,598,600	



KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	16,250,000	
3	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	31,470,200	
3	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,417,000	
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	16,827,000	
3	522111	Belanja Langganan Listrik	12,512,512	
3	522112	Belanja Langganan Telepon	4,955,279	
3	522113	Belanja Langganan Air	3,585,000	
3	522141	Belanja Sewa	68,040,000	
3	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8,496,000	
3	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12,348,685	
3	524111	Belanja Perjalanan Biasa	15,111,500	
3	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,000,000	
3	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14,311,342,473	
<b>J U M L A H</b>			<b>24,513,366,029</b>	<b>24,513,366,029</b>

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005  
 MAHKAMAH AGUNG : 01  
 BADAN URUSAN ADMINISTRASI : 100  
 SUMATERA SELATAN : 401909  
 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

WILAYAH/PROVINSI  
 SATUAN KERJA

NERACA PERCOBAAN  
 TINGKAT SATUAN KERJA  
 PER 30 JUNI 2021  
 (DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NPSAIKS  
 Tanggal: 25-08-21  
 Halaman: 2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH  
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN  
UNTUK SEMESTER I TAHUN 2021  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
WILAYAH/PROVINSI : 1100 SUMATERA SELATAN  
SATUAN KERJA : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
JENIS SATKER : XX Cek Tabel

KD LAPORAN : LRPS.S01  
TANGGAL : 25/08/21  
HAL : 1  
PROG. ID : lue\_perblank

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			SEMESTER INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN SEMESTER INI	PENGEMBALIAN SEMESTER INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN SEMESTER INI	
1	2	3	4	5	6	7	
				Tidak Ada Data Yang Dicetak			

**LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH  
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN  
UNTUK SEMESTER I TAHUN 2021  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 WILAYAH/PROVINSI : 1100 SUMATERA SELATAN  
 SATUAN KERJA : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
 JENIS SATKER : XX Cek Tabel

KD. LAPORAN : LPPE.S01b  
 TANGGAL : 25/08/21  
 HAL : 1  
 PROG. ID : lue\_penblank

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN				% REAL. PEND
			JUMLAH SAMPAI DENGAN SEMESTER INI	SEMESTER INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	
		-----	Tidak Ada Data Yang Dicetak -----				



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN  
SEMESTER I TAHUN 2021  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
WILAYAH/PROVINSI : 1100 SUMATERA SELATAN  
SATUAN KERJA : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBSS 01  
Tanggal : Wednesday, August  
Halaman : 2  
Prog.Id : lu\_lrbsskt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA						% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI	PENGEMBALIAN S/D SEMESTER INI	JUMLAH NETO S/D SEMESTER INI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
5211	Belanja Barang Operasional										
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	435,320,000	435,320,000	270,548,000	270,548,000	0	270,548,000	62.15	164,772,000		
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,630,000	11,630,000	4,598,600	4,598,600	0	4,598,600	39.54	7,031,400		
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	50,040,000	42,340,000	16,250,000	16,250,000	0	16,250,000	38.38	26,090,000		
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	33,750,000	33,750,000	31,470,200	31,470,200	0	31,470,200	93.25	2,279,800		
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>530,740,000</b>	<b>523,040,000</b>	<b>322,866,800</b>	<b>322,866,800</b>	<b>0</b>	<b>322,866,800</b>	<b>61.73</b>	<b>200,173,200</b>		
5218	Belanja Barang Persediaan										
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	27,000,000	27,000,000	16,827,000	16,827,000	0	16,827,000	62.32	10,173,000		
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218</b>	<b>27,000,000</b>	<b>27,000,000</b>	<b>16,827,000</b>	<b>16,827,000</b>	<b>0</b>	<b>16,827,000</b>	<b>62.32</b>	<b>10,173,000</b>		
5221	Belanja Jasa										
522111	Belanja Langganan Listrik	60,000,000	60,000,000	12,512,512	12,512,512	0	12,512,512	20.85	47,487,488		
522112	Belanja Langganan Telepon	9,000,000	9,000,000	4,955,279	4,955,279	0	4,955,279	55.06	4,044,721		
522113	Belanja Langganan Air	6,000,000	6,000,000	3,585,000	3,585,000	0	3,585,000	59.75	2,415,000		
522141	Belanja Sewa	136,080,000	136,080,000	68,040,000	68,040,000	0	68,040,000	50.00	68,040,000		
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>	<b>211,080,000</b>	<b>211,080,000</b>	<b>89,092,791</b>	<b>89,092,791</b>	<b>0</b>	<b>89,092,791</b>	<b>42.21</b>	<b>121,987,209</b>		
5231	Belanja Pemeliharaan										
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	119,250,000	119,250,000	8,496,000	8,496,000	0	8,496,000	7.12	110,754,000		
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52,400,000	52,400,000	12,348,685	12,348,685	0	12,348,685	23.57	40,051,315		
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>171,650,000</b>	<b>171,650,000</b>	<b>20,844,685</b>	<b>20,844,685</b>	<b>0</b>	<b>20,844,685</b>	<b>12.14</b>	<b>150,805,315</b>		
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri										
524111	Belanja Perjalanan Biasa	48,300,000	48,300,000	15,111,500	15,111,500	0	15,111,500	31.29	33,188,500		
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	<b>48,300,000</b>	<b>48,300,000</b>	<b>15,111,500</b>	<b>15,111,500</b>	<b>0</b>	<b>15,111,500</b>	<b>31.29</b>	<b>33,188,500</b>		
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>986,770,000</b>	<b>981,070,000</b>	<b>464,742,776</b>	<b>464,742,776</b>	<b>0</b>	<b>464,742,776</b>	<b>47.37</b>	<b>516,327,224</b>		

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN  
SEMESTER I TAHUN 2021  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 WILAYAH/PROVINSI : 1100 SUMATERA SELATAN  
 SATUAN KERJA : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBS5 01  
 Tanggal : Wednesday, August  
 Halaman : 3  
 Prog.Id : lu\_lrbssikt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA						% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI	PENGEMBALIAN S/D SEMESTER INI	JUMLAH NETO S/D SEMESTER INI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
EAC	Layanan Umum	4.698.741.000	4.691.041.000	2.459.970.089	2.459.970.089	( 29)	2.459.970.060	52,55	2.221.070.940		
52	BELANJA BARANG										
5212	Belanja Barang Non Operasional										
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5.000.000	12.700.000	2.417.000	2.417.000	0	2.417.000	19,03	10.283.000		
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	5.000.000	12.700.000	2.417.000	2.417.000	0	2.417.000	19,03	10.283.000		
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	5.000.000	12.700.000	2.417.000	2.417.000	0	2.417.000	19,03	10.283.000		
	JUMLAH BELANJA KRO 1066 EAC	5.000.000	12.700.000	2.417.000	2.417.000	0	2.417.000	19,03	10.283.000		
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1066	4.693.741.000	4.693.741.000	2.462.387.089	2.462.387.089	( 29)	2.462.387.060	52,46	2.231.353.940		
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung										
EAD	Layanan Sarana Internal										
53	BELANJA MODAL										
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.331.160.000	1.331.160.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	1,88	1.306.160.000		
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	1.331.160.000	1.331.160.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	1,88	1.306.160.000		
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1.331.160.000	1.331.160.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	1,88	1.306.160.000		
	JUMLAH BELANJA KRO 1071 EAD	1.331.160.000	1.331.160.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	1,88	1.306.160.000		
EAE	Layanan Prasarana Internal										
53	BELANJA MODAL										
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan										
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.488.465.000	18.488.465.000	14.311.342.473	14.311.342.473	0	14.311.342.473	77,41	4.177.122.527		
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	18.488.465.000	18.488.465.000	14.311.342.473	14.311.342.473	0	14.311.342.473	77,41	4.177.122.527		
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	18.488.465.000	18.488.465.000	14.311.342.473	14.311.342.473	0	14.311.342.473	77,41	4.177.122.527		

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN  
SEMESTER I TAHUN 2021  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 WILAYAH/PROVINSI : 1100 SUMATERA SELATAN  
 SATUAN KERJA : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBS5 01  
 Tanggal : Wednesday, August  
 Halaman : 4  
 Prog.Id : lu\_lrbsskt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI	PENGEMBALIAN S/D SEMESTER INI	JUMLAH NETO S/D SEMESTER INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	JUMLAH BELANJA KRO 1071 EAE	18.488.465.000	18.488.465.000	14.311.342.473	14.311.342.473	0	14.311.342.473	77,41	4.177.122.527	
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1071	19.819.625.000	19.819.625.000	14.336.342.473	14.336.342.473	0	14.336.342.473	72,33	5.483.282.527	
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04 W/A	24.513.366.000	24.513.366.000	16.798.729.562	16.798.729.562	( 29)	16.798.729.533	68,53	7.714.636.467	
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03.04	24.513.366.000	24.513.366.000	16.798.729.562	16.798.729.562	( 29)	16.798.729.533	68,53	7.714.636.467	
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 03	24.513.366.000	24.513.366.000	16.798.729.562	16.798.729.562	( 29)	16.798.729.533	68,53	7.714.636.467	
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	24.513.366.000	24.513.366.000	16.798.729.562	16.798.729.562	( 29)	16.798.729.533	68,53	7.714.636.467	
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	24.513.366.000	24.513.366.000	16.798.729.562	16.798.729.562	( 29)	16.798.729.533	68,53	7.714.636.467	
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	24.513.366.000	24.513.366.000	16.798.729.562	16.798.729.562	( 29)	16.798.729.533	68,53	7.714.636.467	
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	24.513.366.000	24.513.366.000	16.798.729.562	16.798.729.562	( 29)	16.798.729.533	68,53	7.714.636.467	
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	24.513.366.000	24.513.366.000	16.798.729.562	16.798.729.562	( 29)	16.798.729.533	68,53	7.714.636.467	

**LAPORAN OPERASIONAL  
 TINGKAT SATUAN KERJA**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2021 DAN 2020  
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN  
 SATUAN KERJA : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Cukai	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.00
<b>Jumlah Pendapatan Perpajakan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
<b>Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>PENDAPATAN HIBAH</b>				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
<b>Jumlah Pendapatan Hibah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>				
Beban Pegawai	1,976,559,284	1,579,955,897	396,603,387	25.10
Beban Persediaan	27,332,000	7,968,500	19,363,500	243.00
Beban Barang dan Jasa	410,693,687	357,356,295	53,337,392	14.92
Beban Pemeliharaan	25,577,685	127,087,525	( 101,509,840)	( 79.87)
Beban Perjalanan Dinas	15,111,500	23,604,464	( 8,492,964)	( 35.98)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Beban Bunga	0	0	0	0.00
Beban Subsidi	0	0	0	0.00
Beban Hibah	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	114,623,954	115,785,778	( 1,161,824)	( 1.00)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>2,569,898,110</b>	<b>2,211,758,459</b>	<b>358,139,651</b>	<b>16.19</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>( 2,569,898,110)</b>	<b>( 2,211,758,459)</b>	<b>( 358,139,651)</b>	<b>( 16.19)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
<b>Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>



**LAPORAN OPERASIONAL  
 TINGKAT SATUAN KERJA**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2021 DAN 2020  
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 WILAYAH/PROPINSI : 1100 SUMATERA SELATAN  
 SATUAN KERJA : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>Lancar</b>				
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>				
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
<b>Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	510,000	( 510,000)	( 100.00)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	125,000	( 125,000)	( 100.00)
<b>Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>0</b>	<b>385,000</b>	<b>( 385,000)</b>	<b>( 100.00)</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>385,000</b>	<b>( 385,000)</b>	<b>( 100.00)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT) - LO</b>	<b>( 2,569,898,110)</b>	<b>( 2,211,373,459)</b>	<b>( 358,524,651)</b>	<b>( 16.21)</b>

Pangkalan Balai, 01 Juli 2021  
 Sekretaris

Endang Efendi S.E.,M.M  
 NIP. 198409132009041002